

DEMOKRATISASI SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta)

Iis Arifudin

UIN SGD Bandung DPK Universitas Wiralodra Indramayu
E-Mail : iisarifudin75@gmail.com

DOI 10.5281/zenodo.3553804

Received	Revised	Accepted
18 December 2018	18 January 2019	21 January 2019

THE DEMOCRATIZATION OF EDUCATIONAL SYSTEM IN ISLAMIC BOARDING SCHOOL (CASE STUDY IN AL-MUNAWIR ISLAMIC BOARDING SCHOOL IN KRAPYAK YOGYAKARTA)

Abstract

The research aims to investigate: (1) implementation of democratization of educational system in islamic boarding school; (2) the factor of proponent and inhibit in implementing of democratization of educational system in boarding school; and (3) the prospect of democratization of educational system in boarding school to shape civil society. The research was qualitatif approach by using case study. Research subject are headmaster of boarding school and student. The data were collected by observation, interview, and documentation. The data were analyzed descriptively. The results showet that: The first; implementation of the democratization of the educational system in Islamic boarding schools in the form of: 1) to establish an open attitude through a process approach in teaching. 2) to establish collective leadership. 3) There is no punishment system for students who violated the regulation, but by inculcating self-awareness. 4) There is freedom for student of boarding school to have communication devices / mobile phones. 5) the headmaster of boarding school gave concessions to student to look for general knowledge outside the boarding school. Second; Supporting Factors: education of Humanist-religious, enthusiasm and religious motivation, sincerity, and autonomy and independence. While the

inhibiting factors include: Eliteism in religion. Barakah tradition and total obedience was wrong. Third; The prospect of democratization educational system in boarding school to shape civil society. Civil society was the form of society that was based on religion as a source of morality, inspiration and action in order of social life for social togetherness to live peacefully, democratic and tolerant, so that shape an ethical society, egalitarian and civilization.

Keyword: democratization, egalitarian, openness attitude, and civil society

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi: (1) pelaksanaan demokratisasi sistem pendidikan di Pondok Pesantren; (2) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan demokratisasi sistem pendidikan di pondok pesantren; dan (3) prospek demokratisasi sistem pendidikan pondok pesantren dalam mewujudkan masyarakat madani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Subyek penelitiannya adalah pengasuh pesantren dan santri. Metode pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data bersifat deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan: Pertama; Pelaksanaan demokratisasi sistem pendidikan di pondok pesantren berupa: 1) Pembentukan sikap terbuka melalui pendekatan proses dalam pengajaran. 2) Membentuk kepemimpinan kolektif. 3) Tidak ada sistem ta'zir (hukuman) bagi santri yang melanggar qanun (peraturan), tapi dengan penanaman kesadaran diri. 4) Adanya kebebasan bagi santri untuk memiliki alat komunikasi/handphone. 5) Pengasuh memberikan kelonggaran kepada santri untuk mencari ilmu pengetahuan umum di luar pondok pesantren. Kedua; Faktor Pendukung: Pendidikan humanis-religius, semangat dan motivasi agama, keikhlasan, dan otonomi serta kemandirian. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: Elitisme dalam agama. Tradisi barokah dan kepatuhan total yang salah. Ketiga; Prospek demokratisasi sistem pendidikan pesantren dalam mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan bentuk masyarakat yang didasarkan agama sebagai sumber moral, inspirasi dan aksi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat atas kebersamaan sosial untuk hidup secara damai, penuh demokratis dan toleransi, sehingga terwujud masyarakat etis, egaliter dan berbudaya. Karena masyarakat madani tidak akan terwujud tanpa proses transmisi kebudayaan yang di dalamnya sangat berperan fungsi pendidikan.

Kata Kunci: Demokratisasi, egaliter, sikap terbuka, masyarakat madani

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Secara konseptual demokrasi adalah merupakan produk Barat yang merupakan sebuah sintesa dari sekian banyak pola yang berkembang, mulai dari kapitalisme, liberalisme, sosialisme sampai pada fasisme. Namun, dari segi makna, kandungan dan nilai-nilai yang hendak diperjuangkan oleh demokrasi merupakan gejala kemanusiaan yang bersifat universal. Ujung dari demokrasi ini adalah pembelaan pada martabat manusia, hak-hak individu atau kelompok dan

persamaan derajat. Oleh karena keuniversalan sifat ini, maka otoritarianisme dan diktatorisme senantiasa mendapat perlawanan dalam sejarah perjuangan bangsa di belahan dunia manapun.¹

Demikian akhirnya demokrasi menjadi sebuah gerakan yang mewarnai perkembangan politik global. Yang mana pada akhir abad ke dua puluh dicatat oleh banyak orang sebagai saat munculnya gerakan pro-demokrasi di seluruh belahan dunia dan keberhasilan gerakan itu di banyak negara.²

Sebenarnya dalam dunia Islam, tradisi yang merujuk pada cita-cita demokrasi tersebut di atas pernah dijalankan pada masa pemerintahan *Khulafaur Rosyidin*. Namun, dalam perjalanan sejarahnya tradisi yang demokratis ini pernah juga hilang bersamaan dengan munculnya sistem kerajaan dalam pemerintahan dunia Islam. Dan kini tradisi yang demokratis ini telah ditumbuhkembangkan kembali. Beranjak dari realitas historis atas takluknya kerajaan-kerajaan besar Islam serta penetrasi Barat pada dunia Islam. Karena hal inilah yang menyadarkan umat Islam akan kelemahan dan kemundurannya. Kesadaran yang demikian inilah yang mendorong umat Islam (terutama tokoh-tokoh Islam) untuk mencari sebab kelemahan umat Islam di satu sisi dan kemajuan Barat di sisi lain.

Ternyata salah satu sebab kemunduran umat Islam menurut Syah Wali Allah (1706-1762) adalah pindahnya sistem kekhilafahan kepada sistem kerajaan. Untuk itu Syah Wali Allah mengajak kepada seluruh umat Islam untuk menghidupkan kembali sistem pemerintahan yang terdapat di zaman khulafaur Rosyidin. Dengan kata lain pemerintahan yang absolut harus segera diakhiri dan diganti dengan sistem yang demokratis.³

Demikian pada akhirnya demokratisasi terus berkembang dalam dunia Islam dan bahkan akhirnya istilah ini tidak hanya menjadi rujukan bidang politik saja, tetapi juga bidang-bidang yang lain dalam kehidupan kebersamaan termasuk di dalamnya adalah bidang pendidikan. Di Indonesia, demokratisasi pendidikan ini makin berkumandang sejak era reformasi. Karena tersendat-sendatnya perjalanan demokrasi di Indonesia ini dinilai berkaitan erat dengan pola pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh bangsa ini, yaitu pendidikan yang kurang demokratis. Hal ini merupakan konsekuensi dari hakekat pendidikan itu sendiri, yaitu proses pembudayaan dan bahkan berkembangnya kebudayaan itu adalah karena pendidikan. Itulah sebabnya menurut H.A.R. Tilaar bahwa krisis yang dialami masyarakat merupakan refleksi dari krisis pendidikan.⁴ Lebih lanjut menurut John Dewey bahwa pendidikan adalah sarana *par exelent* yang menumbuhkan kehidupan demokrasi.⁵

Pentingnya demokrasi ini yang harus dimulai dari pendidikan sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari cita-cita pendirian negara ini, yaitu negara yang adil dan makmur. Dan sejak istilah masyarakat madani diintrodusir ke Indonesia pada tahun 1995 oleh Anwar Ibrahim sampai pada akhirnya menjadi wacana ilmiah yang mengundang perhatian banyak orang, berikut menyusulnya gerakan reformasi,

maka bersamaan dengan itu pula demokratisasi semakin memperoleh dukungan dan menjadi wacana yang tidak bisa dipisahkan dengan konsep masyarakat madani tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Asrori S. Karni bahwa hubungan antara masyarakat madani (*civil society*) dengan demokratisasi seperti dua sisi sebuah mata uang, keduanya ko-eksistensi, yang berarti keberadaannya akan sangat ditentukan oleh keduanya. Hanya saja dalam *civil society* yang kuat, demokrasi dapat ditegakkan dengan baik. Dan hanya dalam situasi yang demokratislah *civil society* bisa tumbuh dan berkembang dengan baik; yang oleh Nurcholish Madjid dikatakan bahwa *civil society* sebagai tempat persemaian demokrasi.⁶

Pernyataan tersebut sangatlah beralasan, karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya realitas yang pluralistik yang didukung oleh modernisasi yang terus melaju ini tanpa adanya demokratisasi bisa memperparah hegemoni dan dominasi yang kuat terhadap yang lemah. Yang buah dari semuanya, tak lain adalah kekacauan, ketidakharmonisan, kepincangan dan kerusakan.

Demikian demokrasi menjadi tuntutan dan sejak awal telah menjadi kebijakan sistem pemerintahan dan sistem pembangunan nasional. Namun, ada kesan selama ini sistem pendidikan pesantren menjadi bagian dari upaya pembangunan nasional dan yang diharapkan menjadi bagian tempat persemaiannya demokrasi dinilai kurang demokratis, baik dari segi model pendekatan pendidikan yang digunakannya, yaitu cenderung pada pendekatan indoktrinasi saja sehingga kurang memberi kebebasan pada santri maupun dari segi gaya kepemimpinannya.⁷

Kesan atau penilaian kurang demokratis yang dialamatkan pada pondok pesantren tersebut kiranya bukan hanya merupakan penilaian tanpa ada sebab-sebab yang ditelusurinya. Setidaknya hal ini dapat kita telusuri dari hakekat keberadaan pesantren itu sendiri di tengah-tengah berbagai sistem pendidikan yang ada. Dari sini pesantren kita lihat sebagai bagian dari upaya kebangkitan Islam melalui jalur pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebangkitan Islam merupakan upaya pengukuhan identitas komunal tertentu, sedangkan demokrasi adalah upaya pengakomodasian pluralitas.

Adapun mengenai pendekatan yang cenderung indoktrinasi dapat kita telusuri basisnya, yaitu bahwa Islam sebagai agama adalah doktrin kebenaran yang diturunkan agar supaya digunakan sebagai pedoman hidup umat manusia. Oleh karena itu, dalam pengertian yang seperti ini, maka sistem pendidikan Islam baik yang diimplementasikan karena hanya sebatas didorong oleh hasrat untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam atau lebih dari itu, yaitu sistem yang mengajarkan ajaran Islam atau bahkan suatu sistem pendidikan Islam yang meliputi kedua hal tersebut adalah pada dasarnya mempunyai kesamaan dalam titik tuju, yaitu pembentukan kepribadian muslim melalui penanaman nilai-nilai Islam yang bersumber dari firman Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Dalam pengertian yang demikian ini, pendekatan pendidikan yang diterapkan dalam pendidikan

Islam adalah cenderung pada pendekatan indoktrinasi.

Namun, dalam perkembangan selanjutnya pendekatan ini dinilai kurang demokratis, karena tidak sejalan dengan perkembangan kehidupan yang demokratis, yakni mengabaikan hak anak untuk menentukan nilai-nilainya sendiri secara bebas. Dan akibat dari pendekatan ini di antaranya adalah timbulnya fanatisme sempit yang kurang bisa menghargai atau memahami berbagai variasi nilai dari realitas pluralistik sosio-kultural ini.

Selanjutnya dari segi gaya kepemimpinannya dapat kita telusuri yaitu dengan melihat tujuan pesantren, yakni ingin mencetak ulama-ulama yang mampu memahami hukum-hukum Allah dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.⁸ Yang kemudian dari ulama-ulama ini pula diharapkan nilai-nilai yang Islami ditransformasikan dalam kehidupan umat manusia. Dari sinilah lahir kelompok elit agama yang memiliki otoritas atas nama Allah dan di luar itu ada kaum awam yang berhak mendapat bimbingannya. Dalam pengertian yang demikian ini, nampaknya demokrasi yang ingin memberdayakan rakyat mendapat tekanan, sehingga muncul pertanyaan: apakah pesantren itu demokratis?

Dari kegelisahan akademik tersebut, penelitian ini akan diupayakan untuk melihat kebenaran demokratisasi yang terjadi di pondok pesantren. Karena penelitian yang selama ini telah dilakukan cenderung hanya melihat dari sisi pergulatannya dengan modernisasi, sedangkan dari segi demokratisasi jarang dilakukan orang (untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali) dan walaupun ada, itu hanya membahas tidak secara detail. Padahal dari perspektif tersebut di atas demokratisasi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam modernisasi, di mana demokrasi dapat memberikan nilai-nilai yang bisa digunakan sebagai landasan dalam mengarungi kehidupan modern yang semakin pluralistik.

2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1). Bagaimana pelaksanaan demokratisasi sistem pendidikan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta?
- 2). Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan demokratisasi sistem pendidikan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta?
- 3). Bagaimana prospek demokratisasi sistem pendidikan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta dalam mewujudkan masyarakat madani?

3. Pembatasan Masalah Penelitian

Bertolak dari masalah penelitian di atas, maka penelitian ini hanya untuk: Mengungkap pelaksanaan demokratisasi sistem pendidikan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta.

- 1). Mencari faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan demokratisasi

sistem pendidikan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta.

- 2). Melihat prospek demokratisasi sistem pendidikan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta dalam mewujudkan masyarakat madani.

4. Signifikansi Penelitian

Secara teoritis, topik penelitian yang diangkat ini sangat penting bagi diskursus pendidikan Islam, terutama pendidikan pesantren, karena berusaha ingin mengungkap pengembangan sistem pendidikan pesantren yang merupakan sub sistem pendidikan Islam. Di mana sistem pendidikan Islam adalah merupakan sub sistem dari sistem pendidikan nasional. Dan sistem pendidikan nasional merupakan sub sistem dari sistem pembangunan nasional. Oleh karena itu, pengembangan sistem pendidikan pesantren adalah dalam rangka ambil bagian dalam pengembangan dan pengokohan sistem pembangunan nasional.

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menentukan kebijakan pengembangan sistem pendidikan pesantren.

B. METODOLOGI PENELITIAN

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini masuk kategori penelitian empirik (*field research*),⁹ karena datanya diangkat dari lapangan. Penelitian ini juga dikategorikan sebagai penelitian kualitatif,¹⁰ karena studi ini lebih menekankan pada proses-proses sosial yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta, terutama proses yang terkait dengan demokratisasi, di mana kajian ini diupayakan secara mendasar, mendalam, berorientasi pada proses dan realitas yang dinamik.

Adapun model yang digunakan adalah studi kasus dengan alasan, karena studi ini dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem yang berupa program, kegiatan, peristiwa atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat, waktu atau ikatan tertentu,¹¹ yaitu Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka yang teknik pengumpulan data ini menggunakan: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang aktivitas kegiatan di pesantren.

b. Wawancara

Dalam wawancara ini, ada 2 (dua) pihak yang diwawancarai, yaitu: Kyai sebagai pengasuh pondok pesantren serta santri. Wawancara yang dilakukan dengan kyai dalam rangka menggali data tentang: sejarah dan perkembangan pesantren, sistem pendidikan pesantren, dan pengelolaan pesantren. Sedangkan wawancara dengan santri difokuskan dalam rangka menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni pelaksanaan demokratisasi sistem pendidikan pesantren.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan sebagai data pendukung yang berkaitan dengan data yang terdokumentasikan oleh pondok pesantren seperti: sejarah pesantren, jumlah santri, latar belakang santri, dan kurikulum yang dipergunakan oleh pesantren tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah diperoleh dengan cara analisis deskriptif kritis, yaitu memaparkan data dan mengklasifikasikan tentang bentuk data, selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap data yang telah terkumpul, kemudian langkah terakhirnya adalah mengangkat makna dari hasil penelitian yang dicapai sebagai sumbangan pemikiran terhadap diskursus pengembangan pondok pesantren di Indonesia.

Proses analisis data itu sendiri melalui proses reduksi data, yaitu data dirangkum, diseleksi, dan dimasukkan ke dalam kategori, tema mana, fokus mana, atau permasalahan mana, sehingga data yang tidak sesuai dengan permasalahan dipisah.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman, seperti yang dikutip oleh Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *reduksi data, data display, conclusion: drawing/verification*.¹²

C. HASIL TEMUAN PENELITIAN

1. Pelaksanaan Demokratisasi Sistem Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta

Dari hasil penelitian di lapangan, ada beberapa temuan tentang pelaksanaan demokratisasi sistem pendidikan di pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Adapun temuan tersebut di antaranya:

2. Pembentukan Sikap Terbuka Melalui Pendekatan Proses Dalam Pengajaran

Tidak salah kiranya apabila dikatakan bahwa pendekatan pendidikan agama itu adalah pendekatan isi atau pendekatan penanaman nilai yang bersifat indoktrinasi. Memang demikian kenyataan sifat agama sebagai doktrin kebenaran itu tidak mungkin rasanya menawarkan juga kebenaran yang lain selain dirinya. Tetapi, merupakan suatu keharusan bahwa seseorang tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang lain yang berbeda dari dirinya, karena yang demikian ini adalah menyalahi kodrat pluralisme sendiri.

Seorang kyai dalam mentransformasikan ilmunya tidak hanya mendoktrin. Akan tetapi, berusaha memberikan kesempatan dan keleluasaan bagi para santrinya untuk bertanya terhadap materi yang disampaikan. Jadi ada proses dua arah dalam proses pelaksanaan pengajarannya.

3. Membentuk Kepemimpinan Kolektif di Pesantren

Pesantren Al-Munawwir terdiri dari beberapa kompleks dan masing-masing kompleks ada pengasuhnya tersendiri. Namun, masing-masing pengasuh merupakan satu kesatuan dalam keluarga besar pondok pesantren Al-Munawwir. Dari sekian banyak pengasuh itu ada 1 (satu) orang yang ditunjuk untuk menjadi sesepuh Pondok Pesantren Al-Munawwir. Pada saat sekarang ini KH. Zainal Abidin Munawwir ditunjuk sebagai Ketua Pengasuh pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Dalam mengambil suatu kebijakan, pengasuh terlebih dahulu berkumpul dan bermusyawarah. Musyawarah merupakan asas demokrasi dalam Islam.

4. Tidak Ada Sistem Ta'zir Bagi Santri yang Melanggar Qonun (Peraturan), tapi Penanaman Kesadaran Diri

Setiap pesantren tentu saja memiliki peraturan tersendiri agar supaya bisa mendisiplinkan para santrinya. Demikian pula dengan pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, memiliki beberapa peraturan tata tertib santri. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam pelaksanaannya. Pada umumnya, di beberapa pondok pesantren, apabila ada santri yang melanggar peraturan, maka di *ta'zir* (dihukum), baik itu berupa skors, dipukul dengan rotan, maupun digundulin. Akan tetapi, di pondok pesantren Al-Munawwir tidak diterapkan sistem *ta'zir*. Tapi, yang dikedepankan adalah suatu proses kesadaran diri bagi setiap santri. Apabila ada santri yang melanggar, maka cukup santri itu dipanggil dan diberi pengarahan tentang efek buruk dari perbuatan yang telah dilakukan oleh santri tersebut dengan tanpa diberikan sanksi hukuman.

Menurut penuturan ibu Nyai Hj. Ida Fatimah ZA, kami menerapkan sistem kesadaran diri bagi santri dan tidak melaksanakan sistem *ta'zir*. Hal ini dikarenakan, kesadaran yang datang dari dalam diri itu lebih penting dibandingkan dengan sistem *ta'zir* (hukuman). Kesadaran diri akan membentuk watak dan kepribadian santri menjadi lebih baik dan bertanggungjawab terhadap semua amal perbuatannya. Sedangkan sistem *ta'zir*, tidak membuat efek jera terhadap pelaku pelanggaran tata tertib, bahkan santri yang melanggar tersebut setelah dihukum itu masih tetap saja melanggar peraturan dikemudian hari.¹³

Pendapat ibu Nyai Hj. Idah Fatimah selaras dengan pendapat dari santri yang bernama Anshori (santri dari Bangka) yang menyatakan bahwa di pesantren ini yang dikedepankan adalah sistem kesadaran, bukan pada sistem *ta'zir* (hukuman).¹⁴

5. Adanya Kebebasan Bagi Santri Untuk Memiliki Alat Komunikasi/ Handphone

Pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta termasuk kategori pesantren *salafiyah*. Hal itu bisa dilihat karena pesantren ini masih berpegang teguh pada tradisi yang sangat kental dalam transformasi keilmuannya, dengan mengkaji kitab kuning dengan metode pembelajaran *sorogan* dan *bandongan*.

Kategori di atas dipertegas oleh Husni Rahim yang mengatakan bahwa pesantren *salafiyah*, pesantren yang menyelenggarakan sistem pendidikan Islam non-klasikal dengan metode *sorogan* dan *bandongan* dalam mengkaji kitab-kitab klasik (baca: kitab kuning) yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama pada abad pertengahan.¹⁵

Abd. Rahman Assegaf berpendapat bahwa ciri pesantren *salafiyah* adalah non-klasikal, tradisional dan mengajarkan murni agama Islam. Aktivitas pesantren tradisional difokuskan pada *tafaqquh fi al-din*, yakni pendalaman pengalaman, perluasan, dan penguasaan khazanah ajaran Islam.¹⁶

Pada umumnya pesantren tradisional mayoritas tidak memperbolehkan santri membawa barang elektronik berupa: Handphone, laptop, maupun televisi. Namun, di pesantren Al-Munawwir ini melihat dari beberapa peraturan yang ada di beberapa komplek itu mayoritas memperbolehkan santri untuk membawa handphone atau laptop. Hal ini menunjukkan suatu bahwa semua pengasuh pesantren Al-Munawwir memiliki jiwa demokratis, tidak menghalangi atau mengekang para santrinya.

Tindakan demokratis yang dilakukan oleh para pengasuh pesantren Al-Munawwir Krapyak itu mungkin dikarenakan kultur yang ada di Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai Kota Pelajar. Mayoritas para pengasuh memiliki ilmu yang tinggi, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum, sehingga dalam menangani masalah selalu terbuka dan disesuaikan dengan perubahan

zaman. Apabila penggunaan handphone dan laptop itu dilarang itu tidak sejalan dengan perkembangan zaman dalam hal komunikasi dan teknologi informasi. Dengan handphone bisa memudahkan santri untuk berkomunikasi dengan keluarganya dan dengan laptop santri bisa mengakses ilmu pengetahuan umum.

6. Pengasuh Memberikan Kelonggaran Kepada Santri Untuk Mencari Ilmu Pengetahuan Umum di Luar Pondok Pesantren

Pesantren Al-Munawwir merupakan pesantren salafiyah dan tradisional yang terletak di Kota Pelajar Yogyakarta. Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, pesantren Al-Munawwir tetap mempertahankan tradisi pada ilmu-ilmu agama. Jadi sistem pendidikan di pesantren ini tetap pada tradisi akademik pesantren, yakni hanya mengkaji Kitab Kuning. Hal ini terlihat dari beberapa sekolah yang ada di pesantren Al-Munawwir maupun beberapa kegiatan akademik yang dilakukan setiap hari. Di atas sudah di paparkan beberapa bentuk sekolah agama yang ada di pesantren Al-Munawwir.

Walaupun tetap mempertahankan tradisi akademik pesantren, namun pengasuh pesantren Al-Munawwir tidak melarang santrinya untuk mempelajari ilmu umum di luar. Itupun dengan syarat tidak mengganggu aktivitas inti pengajian yang ada di pesantren Al-Munawwir. Banyak santri yang berusia sekolah itu mengikuti sekolah umum di luar pesantren pada pagi hari sampai siang. Banyak pula santri yang mengikuti pendidikan tinggi, ada yang kuliah di UGM maupun UIN Yogyakarta.¹⁷ Apabila santri tidak bisa membagi waktu dalam menuntut ilmu, maka pengasuh mempersilahkan untuk keluar dari pesantren.

Sikap yang dilakukan oleh pengasuh pesantren Al-Munawwir memperbolehkan santrinya menuntut ilmu umum di luar pondok merupakan sikap sosok yang berjiwa besar. Dan mungkin inilah yang harus dilakukan oleh setiap pengasuh pesantren salafiyah yang lain sehingga eksistensi pesantren tetap terjaga di tengah gelombang modernisasi dan globalisasi. Hal ini pernah ditulis oleh In'am Sulaiman dalam bukunya: *Masa Depan Pesantren Eksistensi Pesantren di Tengah Gelombang Modernisasi*.¹⁸

Faktor Pendukung dan Penghambat Demokratisasi

1. Faktor Pendukung Demokratisasi

a. Pendidikan Humanis-Religius

Proses pendidikan yang dilaksanakan di pesantren tersebut humanis, lebih spesifik lagi humanis-religius. Di pesantren tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, semua mendapatkan perlakuan yang sama dari kyai maupun para ustadz. Hal ini sesuai dengan prinsip *egaliter* (prinsip

persamaan kedudukan manusia). Prinsip *egaliter* ini sesuai dengan asas-asas demokrasi.

Religiusitas kyai tidak bisa disangkal itu sangat baik. Kyai sebagai ulama pewaris Nabi menjadi contoh bagi umatnya, terutama bagi para santrinya. Dari pancaran tingkah laku yang dicerminkan kyai menjadi suri tauladan bagi para santrinya. Fenomena shalat jama'ah 5 waktu di masjid, mengaji Al-Qur'an, maupun kesalehan ritual yang lainnya menjadi rutinitas yang selalu dilaksanakan oleh kyai maupun oleh santri. Ini membuktikan religiusitas kyai dan santri sangat baik.

Dalam pelaksanaan shalat berjama'ah, di situ sangat kental sekali proses demokratisasinya. Di mana tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin, yang tua dan yang muda, yang berpangkat dan rakyat jelata, apabila datangnya lebih dulu, maka dia berhak menempati *shaf'* paling depan, walaupun dia itu miskin dan masih anak-anak sekalipun.

b. Semangat dan Motivasi Agama

Semua warga pesantren meyakini bahwa menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban demikian pula mengamalkannya. Kyai merasa terpanggil untuk mengamalkan ilmunya kepada para santrinya, tanpa mempertimbangkan imbalan materi, tapi semangat dan motivasi agama yang tinggi, kyai tetap konsisten dalam mentransfer ilmunya.

Dalam pandangan kyai dan ibu Nyai, siapapun boleh mengakses ilmu tanpa ada sekat-sekat yang menghalanginya, termasuk sekat materi; kaya-miskin, sekat jenis kelamin; laki-laki-perempuan, mempunyai hak yang sama dalam menuntut ilmu. Tidak ada alasan bagi orang untuk tidak belajar di pesantren Al-Munawwir karena miskin.

Gambaran ini menunjukkan bahwa semangat keagamaan dan motivasi agama memberikan dorongan pada pesantren untuk menghilangkan diskriminasi dalam hal mengakses pendidikan. Siapa saja memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan.

Doktrin-doktrin dan ajaran agama merupakan sumber motivasi yang tiada pernah kering dalam menegakkan cita-cita serta nilai-nilai yang ingin diperjuangkan oleh demokrasi.

c. Keikhlasan

Aspek dasar dari seluruh kegiatan di pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta didasarkan pada nilai-nilai keikhlasan. Kyai mengajarkan ilmunya dengan dasar keikhlasan, tanpa didasari ingin mendapatkan materi. Begitu pula dengan santri belajar, itu dalam rangka mencari keridhoan Allah SWT, bukan karena yang lain yang bersifat dunia semata. Sehingga segala aktivitas di pesantren diharapkan tidak mempunyai

tendensi apapun selain mengharapkan keridhoan Allah SWT.

Gambaran ini menunjukkan pentingnya prinsip keikhlasan dalam mendasari setiap aktivitas di pesantren. Demokratisnya prinsip ini adalah bahwa seluruh aktivitas didasarkan atas ketulusan hati dan tidak eksploitatif terhadap sesama dengan mengedepankan kepentingan pribadi.

d. Otonomi dan Kemandirian

Sejak pertamakali didirikan, pesantren Al-Munawwir adalah milik masyarakat. Kyai dan keluarganya beserta masyarakat yang peduli terhadap pendirian pesantren berusaha bahu membahu untuk membangun pesantren ini. Bahkan lembaga pendidikan yang berada di dalam naungannya pun adalah lembaga swasta, bukan negeri. Semua didirikan dan dioperasikan berdasar kepentingan, kemauan dan kemampuan masyarakat sendiri.

Otonomi yang dimiliki pesantren merupakan otonomi yang luas. Dari segi pendanaan, pesantren Al-Munawwir tidak mengandalkan bantuan pemerintah, tapi di dasarkan atas kemampuan masyarakat itu sendiri. Begitu pula manajemennya dilakukan secara mandiri atas kemampuan sumber daya sendiri. Mereka bekerja atas dasar kreativitas sendiri dan tidak atas instruksi dari kepentingan-kepentingan di luar pesantren. Sebagai lembaga yang independen, pesantren bebas dari kepentingan-kepentingan politik.

Dari gambaran di atas, nampak bahwa pesantren ini sebagai lembaga pendidikan telah mendapatkan otonominya sejak pertama kali didirikan. Ia didirikan, dikelola, dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sendiri ia terbebas dari kepentingan kelompok-kelompok politik tertentu atau pun kepentingan rezim yang berkuasa. Hal inilah modal yang penting untuk menjadikan pesantren menjadi sebuah lembaga pendidikan Islam yang terbuka dan demokratis.

2. Faktor Penghambat Demokratisasi

a. Elitisme dalam Agama

Munculnya elitisme dalam agama ini karena agama sering melahirkan kaum-kaum elit dalam agama. Hal ini merupakan dampak dari sifat agama yang sering melegitimasi kekuasaan dalam masyarakat.

Pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan keagamaan memunculkan strata sosial yang demikian. Di mana kyai bersama para ustadz sering dipandang sebagai sesosok elit dalam kelompok mereka. Dan elitisme ini telah disahkan oleh kultur pesantren ini, yang menyebut putra kyai dengan sebutan Gus dan perlakuan yang lebih istimewa dari para santrinya.

b. Tradisi Barokah dan Kepatuhan Total yang Salah

Barokah dalam pengertiannya adalah *ziyadatul khoir* (tambahnya kebaikan). Istilah ini sangat populer di dunia pesantren, terutama pesantren tradisional-salafiyah. Barokah menjadi legitimasi pencarian ilmu bagi para santri. Banyak santri yang mondok belasan tahun, dengan tanpa bekerja keras dalam menuntut ilmu melalui pengajian maupun menelaah kembali kitab-kitab yang telah dipelajarinya. Namun, hanya berharap pada barokah kyai, santri tersebut terbuai akan mimpi mendapatkan barokah kyai dan menjadi cerdas serta berhasil tanpa menuntut ilmu/belajar dipondok, cukup dengan mengabdikan diri secara total kepada kyai di pondok pesantren tersebut.

Pengabdian total yang dilakukan santri kepada kyai maupun keluarganya terkadang merendahkan dirinya dihadapan sesama manusia. Ini yang menyebabkan kedudukan manusia dipandang tidak sama. Padahal dalam doktrin agama dinyatakan bahwa kedudukan manusia itu sama, akan tetapi yang membedakan adalah unsur ketaqwaannya.

Dari gambaran di atas, nampak sulit dibedakan antara berakhlak mulia dengan kepatuhan total yang membelenggu kreativitas. Padahal demokrasi adalah menumbuhkembangkan kreativitas serta membangun kemampuan mengkritisi, di samping santri juga harus sanggup untuk menerima kritik.

Prospek Demokratisasi Sistem Pendidikan Pesantren Al-Munawwir dalam Mewujudkan Masyarakat Madani

Sebagai sebuah wacana, masyarakat madani merupakan produk pengalaman sejarah kemasyarakatan yang dimunculkan sebagai suatu paradigma dalam membentuk tata kemasyarakatan yang ideal. Istilah madani diambil dari kata *madinah* dan digunakan sejak beberapa abad lalu dalam *civil society* (beradab) dan istilah yang kemudian biasanya merujuk pada *civilization*,¹⁹ yang artinya lebih mengacu pada penciptaan peradaban karena tunduk dan patuh kepada ajaran agama yang dinyatakan pada supremasi hukum dan peraturan. Dari pengertian ini masyarakat madani mengandung 3 (tiga) hal, yaitu agama, peradaban dan perkotaan. Agama merupakan sumber, peradaban adalah prosesnya, dan masyarakat kota yang beradab adalah hasilnya.

Masyarakat madani merupakan bentuk masyarakat yang didasarkan agama sebagai sumber moral, inspirasi dan aksi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat atas kebersamaan sosial untuk hidup secara damai, penuh demokratis dan toleransi, sehingga terwujud masyarakat etis, egaliter dan berbudaya.

Maka pantaslah sebagaimana dikatakan oleh Bachtiar Alam bahwa masyarakat madani yang ingin diwujudkan adalah wilayah kehidupan social yang

terletak di antara Negara dan komunitas lokal di mana keduanya terhimpun kekuatan masyarakat untuk mempertahankan kebebasan, keekaragaman serta kemandirian masyarakat.²⁰

Lebih lanjut, secara ideal masyarakat madani bukan hanya untuk mewujudkan kemandirian masyarakat berhadapan dengan Negara, melainkan juga terwujudnya nilai-nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat, terutama keadilan (*justice*), persamaan (*egaliter*), kebebasan (*freedom*) dan kemajemukan (*pluralism*) sehingga atas dasar nilai-nilai dan prinsip-prinsip seperti itu akan mampu membangun pemerintah yang demokratis.

Dengan demikian prasyarat untuk membangun suatu kehidupan yang *egalitarian*, *kosmopolit* dan penuh konsensus yang didasarkan pada saling pengertian adalah mentradisikan nilai-nilai budaya dalam masyarakat madani yang berfungsi sebagai infrastruktur yang fundamental bagi kehidupan baru yang mencerminkan wawasan nilai-nilai demokratik yang luwes. Karena masyarakat madani tidak akan terwujud tanpa proses transmisi kebudayaan yang di dalamnya sangat berperan fungsi pendidikan.²¹

Oleh karena itu, pendidikan sangat berfungsi sekali dalam mewujudkan masyarakat madani, terutama pendidikan yang dilakukan di pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Masyarakat adalah merupakan sekumpulan orang-orang. Apabila individu-individu itu baik dan beradab, maka masyarakat madani bisa terwujud. Namun sebaliknya, apabila individu-individu itu rusak atau tidak bermoral dan berakhlak, maka sulit akan bisa mewujudkan masyarakat madani.

Peran pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta dalam masyarakat sekitar pondok begitu besar, baik itu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan agama maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan agama yang terjadi di masyarakat, pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta setiap bulan pada hari Selasa malam selalu mengadakan *bahstul masail* (membahas masalah-masalah keagamaan). Bahkan kumpulan dari *bahstul masail* tersebut didokumentasikan oleh KH. Zainal Abidin Munawwir.

Adapun peran pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, di antaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*; setiap tahun pada bulan Muharram tepatnya tanggal 10 Muharram diadakan bakti sosial berupa pemberian santunan kepada anak yatim-piatu. *Kedua*; setiap tahun pula pada saat lebaran Idul Adha, pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta membagikan daging qurban kepada masyarakat sekitar. *Ketiga*; pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta melakukan kerjasama dengan Ketua LP Wirogunan dalam memberikan bimbingan rohani kepada para narapidana di LP tersebut.

Itulah beberapa gambaran tentang prospek demokratisasi pesantren dalam mewujudkan masyarakat madani, di mana pesantren Al-Munawwir tidak hanya

berusaha membuat para santrinya memiliki akhlakul karimah/memiliki peradaban yang tinggi, namun juga turut serta aktif dalam kegiatan sosial masyarakat.

D. PENUTUP

Dari beberapa uraian di atas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan demokratisasi sistem pendidikan di pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta berupa: 1) Pembentukan sikap terbuka melalui pendekatan proses dalam pengajaran. 2) Membentuk kepemimpinan kolektif. 3) Tidak ada sistem *ta'zir* (hukuman) bagi santri yang melanggar *qanun* (peraturan), tapi dengan penanaman kesadaran diri. 4) Adanya kebebasan bagi santri untuk memiliki alat komunikasi/handphone. 5) Pengasuh memberikan kelonggaran kepada santri untuk mencari ilmu pengetahuan umum di luar pondok pesantren.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Demokratisasi di Pesantren. Faktor Pendukungnya antara lain: Pendidikan humanis-religius, semangat dan motivasi agama, keikhlasan, dan otonomi serta kemandirian. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: Elitisme dalam agama. Tradisi barokah dan kepatuhan total yang salah.
3. Prospek demokratisasi sistem pendidikan pesantren Al-Munawwir dalam mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan bentuk masyarakat yang didasarkan agama sebagai sumber moral, inspirasi dan aksi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat atas kebersamaan sosial untuk hidup secara damai, penuh demokratis dan toleransi, sehingga terwujud masyarakat etis, *egaliter* dan berbudaya. Karena masyarakat madani tidak akan terwujud tanpa proses transmisi kebudayaan yang di dalamnya sangat berperan fungsi pendidikan.

Oleh karena itu, pendidikan sangat berfungsi sekali dalam mewujudkan masyarakat madani, terutama pendidikan yang dilakukan di pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Proklamasi ke Reformasi*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005).
- Ahmad Muthohar, "Pendidikan dan Demokrasi dalam Arus Reformasi", dalam Ismail SM-Abdul Mukti (ed.), *Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

- Asrori S. Karni, *Civil Society dan Ummah Sintesa Diskursif “Rumah” Demokrasi*, (Jakarta: Logos, 1999).
- Bachtiar Alam, “Civil Society dan Wacana Kebudayaan”, dalam *Kompas* tanggal 28 Juni 1999.
- H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999).
- Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu).
- In’am Sulaiman, *Masa Depan Pesantren Eksistensi Pesantren di Tengah Gelombang Modernisasi*, (Malang: Madani, 2010).
- John Dewey, *Democracy and Education*, (New York: Mac Millan, 1965).
- John L. Esposito and John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim (Problem dan Prospek)*, terjemah Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1999).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994).
- Moh. Nurhakim, *Islam, Doktrin, Pemikiran dan Realitas Historis*, (Malang: UMM Press, 1998).
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996).
- Olaf Schumann, *Dilema Islam Kontemporer: Antara Masyarakat Madani dan Negara Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1999).
- Robert C. Bogdan and Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, (London: Allyn and Bacon, 1998).
- Robert E. Stake, “Case Studies”, dalam Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (ed.), *Handbook Qualitative Research*, (London: Sage Publications, 1994).
- Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Rajawali Press, 1989).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

Catatan Kaki

1. Ahmad Muthohar, “Pendidikan dan Demokrasi dalam Arus Reformasi”, dalam Ismail SM-Abdul Mukti (ed.), *Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 56.
2. John L. Esposito and John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim (Problem dan Prospek)*, terjemah Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 11.
3. Moh. Nurhakim, *Islam, Doktrin, Pemikiran dan Realitas Historis*, (Malang: UMM Press, 1998), hlm. 176.
4. H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 1.
5. John Dewey, *Democracy and Education*, (New York: Mac Millan, 1965), hlm. 81.

6. Asrori S. Karni, *Civil Society dan Ummah Sintesa Diskursif "Rumah" Demokrasi*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 32.
7. Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 2.
8. Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 3.
9. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 29.
10. Lihat Robert C. Bogdan and Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, (London: Allyn and Bacon, 1998), hlm. 4. Lihat pula Sanapiyah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Rajawali Press, 1989), hlm. 18. Lihat juga Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 10. Lihat juga Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 38.
11. Robert E. Stake, "Case Studies", dalam Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (ed.), *Handbook Qualitative Research*, (London: Sage Publications, 1994), hlm. 236.
12. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 246.
13. Hasil wawancara dengan ibu Nyai Hj. Ida Fatimah ZA pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2011.
14. Hasil wawancara dengan santri yang bernama Anshori pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011. Wawancara ini peneliti lakukan sebagai *cross check* atas pernyataan dari ibu Nyai Hj. Ida Fatimah.
15. Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), hlm. 76.
16. Abd. Rahman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Proklamasi ke Reformasi*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), hlm. 185.
17. Hasil wawancara dengan ibu Nyai Hj. Ida Fatimah ZA pada hari Sabtu tanggal 26 November 2011.
18. In'am Sulaiman, *Masa Depan Pesantren Eksistensi Pesantren di Tengah Gelombang Modernisasi*, (Malang: Madani, 2010).
19. Olaf Schumann, *Dilema Islam Kontemporer: Antara Masyarakat Madani dan Negara Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 65.
20. Ali Miftakhu Royad & Darmiyati Zuchdi. Aktualisasi Pendidikan Karakter Berbasis Kultur Sekolah di SMP. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS* Vol 5. No. 1. March 2019. DOI: 10.21831/hsjpi.v5i1.14925
21. Bachtiar Alam, "Civil Society dan Wacana Kebudayaan", dalam *Kompas* tanggal 28 Juni 1999.
22. H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 54.